

## ABSTRAK

Kemajuan teknologi telekomunikasi melalui internet berkembang sangat pesat. Hal ini menimbulkan dampak positif dan negatif bagi suatu negara khususnya Indonesia. Salah satu dampak negatif yang dihasilkan adalah bertambahnya jenis-jenis tindak pidana baru yang berkaitan dengan kemajuan teknologi, seperti tindak pidana *cyberterrorism*. Penulisan ini menguraikan bahwa pengaturan *cyberterrorism* dalam Undang-Undang Terorisme mengatur perbuatan dari tindak pidana ini namun dalam hal pertanggungjawaban tidak membedakan antara pertanggungjawaban perseorangan dengan korporasi, padahal seharusnya dibutuhkan pemisahan pertanggungjawaban pada 2 (dua) subyek hukum karena ancaman pidana penjara tidak dapat diterapkan pada korporasi berbadan hukum yang sebagai pelaku *cyberterrorism*. Sebagai tindak pidana baru diperlukan adanya rumusan mengenai tiga masalah pokok dalam hukum pidana yaitu perbuatan, pertanggungjawaban pidana dan pidana sehingga para penegak hukum dapat melakukan penegakan hukum sesuai dengan pengaturan yang memang mengatur tindak pidana *cyberterrorism*. Dengan melakukan penelitian yang menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, metode pengumpulan data serta spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, diketahui bahwa tindak pidana *cyberterrorism* yang telah diatur sudah mengakomodir perbuatan-perbuatan yang dimaksudkan dalam pengertian tindak pidana *cyberterrorism* sehingga cukup efektif untuk diterapkan pada kasus-kasus yang akan terjadi.

**Kata kunci:** Tindak Pidana, (*cyberterrorism*), Kebijakan Hukum Pidana.

## **ABSTRACT**

*The progress of telecommunications technology through the internet is growing very rapidly. This has a positive and negative impact on a country, especially Indonesia. One of the negative impacts produced is the increasing types of new crimes related to technological advances, such as the crime of cyberterrorism. This writing explains that the regulation of cyberterrorism in the Terrorism Act regulates the actions of these crimes but in terms of accountability does not distinguish between individual accountability and the corporation, even though it should require separation of accountability in 2 (two) legal subjects because the imprisonment cannot be applied to the corporation incorporated as a cyberterrorism agent. As a new criminal act, it is necessary to formulate three main problems in criminal law, namely actions, criminal and criminal liability so that law enforcers can enforce the law in accordance with regulations that do regulate criminal acts of cyberterrorism. By conducting a study that uses a normative juridical approach, the method of data collection and research specifications used is descriptive analytical, it is known that the crime of regulated cyberterrorism has accommodated actions intended in terms of cyberterrorism so that it is effective enough to be applied to cases case that will occur.*

**Keywords:** *Crime, (cyberterrorism), Criminal Law Policy.*